



**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN KOORDINASI
PEMBANGUNAN DI DAERAH
(STUDI TENTANG PENERAPAN SIPD PADA BAPPEDA
KOTA BENGKULU)**

Frans Dione¹, Utami Faradina²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

fransdionesa@gmail.com, Jl. Ampera Raya Raya Kelurahan Cilandak Timur, Indonesia

²Kementerian Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia

utami.faradita@gmail.com, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota
Jakarta Pusat, Indonesia

* Corresponding Author

Email: fransdionesa@gmail.com

Abstract

The success of development is determined by the coordination between the central and local governments, good coordination needs to be supported by accurate information. The main purpose of this research is to know and understand how the implementation of Regional Development Information Systems (RDIS) in improving regional development coordination, besides that, it is also to find out and understand what are the obstacles in the implementation of RDIS in improving regional development coordination. This research method is qualitative descriptive with the inductive approach. Data collection techniques used in this study were interviews, observations and documentations. The data analysis process begins with reducing the data, then presents the data, and ends with drawing conclusions. The results showed that the implementation of the RDIS had been in line with the applicable regulations. However, there are still several constraints, such as the lack of awareness of RDIS implementers. Besides, it is not maximized of implementers' regulations related to administrative sanctions for the persons in charge of RDIS to improve the level of regional compliance. Suggestions from this study include the commitment of the Major in implementing the RDIS program. City need to establish implementing regulations relating to administrative sanctions for local offices that do not support the RDIS program.

Keywords: *policy, planning, data and information, local government.*

Abstrak

Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, koordinasi yang baik perlu didukung oleh informasi yang akurat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan koordinasi pembangunan daerah, selain itu juga untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala dalam penerapan SIPD dalam meningkatkan koordinasi pembangunan daerah di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masih ada beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran para pelaksana SIPD tentang implementasi SIPD yang bisa dilihat dari tingkat keterisian data SIPD di kota Bengkulu. Selain itu, belum maksimal peraturan pelaksana terkait dengan sanksi administratif bagi penanggung jawab SIPD untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pengisian data. Saran dari penelitian ini antara lain perlunya komitmen Walikota dalam mengimplementasikan program SIPD. Pemerintah Kota perlu juga menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan sanksi administratif untuk Dinas Instansi yang tidak mendukung program SIPD.

Kata Kunci: kebijakan, perencanaan, data dan informasi, pemerintah daerah.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan di daerah harus didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan tiap-tiap daerah. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, tepat sasaran, komprehensif, dan sistematis.

Dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat sebagai komunitas lokal harus dilibatkan karena masyarakatlah yang merasakan langsung dampak dari pembangunan tersebut. Pelaksanaan pembangunan di daerah harus dikoordinasikan dari tingkat bawah sampai pemerintahan pusat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Bina Bangda Kemendagri untuk mengoordinasikan perencanaan pembangunan adalah membangun sebuah wadah bagi pemerintah daerah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai perencanaan pembangunan daerah.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengupayakan penerapan konsep e-government untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah yang ada di tingkat pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dengan membangun sebuah sistem informasi yang secara online dapat berjalan secara efisien dan mandiri serta memudahkan siapa saja, kapan saja dan dimana saja untuk mengakses data informasi yang diinginkan melalui sebuah sistem data dan informasi yang disebut Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disingkat SIPD. Dalam pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa, "Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)". Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dari beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia belum seluruhnya mengisi dokumen perencanaan pada SIPD. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan data dari Ditjen Bangda Kemendagri (2018) data yang terinput sebanyak 34% RTRW 2017, 41% RPJPD 2005-2025, 35% Visi dan Misi, 39% RPJMD, 41% RKPD 2017, 33% KUAP/PAS 2017, serta 31% APBD 2017.

SIPD terdiri dari 8 (delapan) kelompok data. Tiap kelompok data diuraikan ke dalam jenis data. Delapan kelompok data tersebut antara lain data umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur wilayah, potensi ekonomi, keuangan daerah, politik, hukum dan keamanan, serta insidensial.

Fenomena yang muncul pada penerapan SIPD antara lain adalah belum lengkapnya data yang diinput, koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemanfaatan e-government yang belum menjadi budaya kurangnya komitmen dari pejabat dan aparat pelaksana serta orientasi perilaku yang belum menganggap pengelelolaan data dan informasi sebagai sesuatu yang penting (Ditjen Bangda Kemedagri : 2018).

Berdasarkan uraian data pada tabel di atas (sipd.bangda.kemendagri/go.id, 2018), maka Penulis tertarik meneliti implementasi program penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dengan pemilihan lokus di kota Bengkulu. Dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1). Bagaimana implementasi SIPD dalam meningkatkan koordinasi pembangunan di Kota Bengkulu? (2). Apa permasalahan dalam penerapan SIPD di Kota Bengkulu? Dan (3) Apa upaya yang dilakukan oleh Bappeda dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut?

Secara etimologis implementasi menurut Tachjan (2008, p.24), merupakan aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Jadi, implementasi mengandung arti sebagai realisasi atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012, p.148) menyatakan bahwa implementasi yaitu apa yang terwujud setelah undang-undang ditetapkan.

Selanjutnya Charles O.Jones dalam Widodo (2009, p.86) merumuskan batasan implementasi sebagai suatu proses dalam rangka mendapatkan sumber daya tambahan. Dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebastiar dalam Wahab (2008, p.65) menyatakan bahwa implementasi sebagai apa yang terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni berbagai kejadian dan kegiatan yang muncul sesudah ditetapkannya pedoman kebijakan.

Dalam penelitian ini digunakan teori Implementasi dari George C. Edward III sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan implementasi langsung dan tidak langsung. Terdapat empat variabel yang sangat menentukan kesuksesan suatu kebijakan menurut Edward III.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Komunikasi yaitu suatu penentu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dan harus mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi dilakukan dengan baik, konsekuensinya setiap keputusan dan peraturan, dikomunikasikan kepada semua pelaksana yang terlibat. Dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi terdapat tiga indikator, yaitu:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan menimbulkan suatu implementasi yang baik juga.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana, harus jelas serta tidak menimbulkan makna ganda atau berbeda.

- c. Konsistensi, perintah yang diberikan konsisten dan jelas untuk kemudian dapat diterapkan, atau bernilai praksis.

Variabel kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Menurut Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staff, sumberdaya penting dalam implementasi kebijakan adalah staff. Ketidakberhasilan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh staff yang tidak memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidang tugasnya.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi merupakan pesan yang mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan informasi berkaitan data kepatuhan dari para pelaksana terhadap regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang, kewenangan bersifat norma, agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana merupakan faktor utama dalam implementasi kebijakan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan mereka lakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal-hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

Variabel keempat, menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, namun bisa saja kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi yakni apabila terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak,

ketika struktur birokrasi tidak kondusif, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

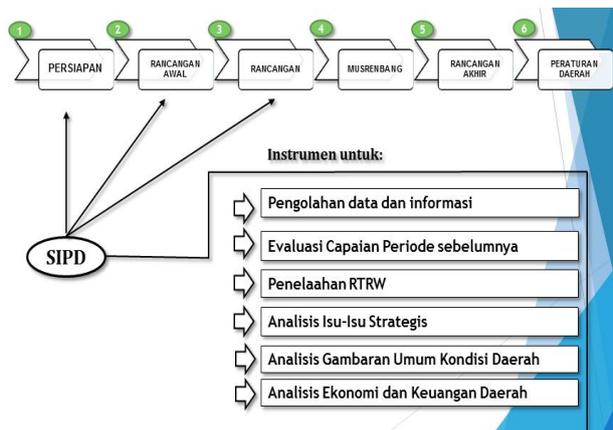
Menurut Wahyudi dan Subando (2009, p.13) mengungkapkan bahwa, upaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen. Selanjutnya C. Laudon dan P. Laudon (2011, p.15) menyatakan bahwa sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen (mulai dari perencanaan, pemrakarsa, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian) dalam suatu organisasi.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berfungsi sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, *real time* dan *online* di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Tentunya Sistem informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. Selain itu, fungsi SIPD sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem informasi yang membantu penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi data dan informasi pembangunan daerah secara elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara nasional.

Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses perencanaan di daerah khususnya berkaitan dengan input usulan program dan kegiatan yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya SIPD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perencanaan pembangunan daerah.

SIPD sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan nasional SIPD dijadikan alat untuk mendukung koordinasi teknis antara Pemerintah Pusat melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan seluruh daerah. Oleh karena itu, SIPD merupakan sarana dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan daerah dengan berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 1. SIPD dalam Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah KEMENDAGRI, 2018

SIPD pada dasarnya merangkum proses penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai alat dalam penyediaan data-data untuk pengolahan data dan informasi, evaluasi capaian periode sebelumnya, penelaahan RTRW, analisis isu-isu strategis, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi keuangan daerah. Sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah saat persiapan, rancangan awal dan rancangan dapat berpedoman pada SIPD yang selanjutnya akan diteruskan pada musrenbang, rancangan akhir, hingga peraturan daerah.

Keterisian SIPD dalam pelaksanaannya dapat diukur melalui tingkat keterisian data. Berdasarkan keterisian data SIPD di Kota Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keterisian data SIPD di Kota Bengkulu pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,30% dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2013 keterisian data SIPD mencapai 37,62%; kemudian pada tahun 2014 keterisian data SIPD mencapai 46,73%; dan pada tahun 2015 keterisian data SIPD mencapai 46,98%; selanjutnya pada tahun 2016 keterisian data SIPD mencapai 50,02%; dan yang terakhir pada tahun 2017 keterisian data SIPD mencapai 58,32%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD semakin membaik, namun dengan tingkat pencapaian yang belum 60% maka secara keseluruhan masih belum baik.

II. METODOLOGI

Desain penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dengan desain dan pendekatan seperti ini, maka penulis mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta maupun fenomena mengenai penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan koordinasi pembangunan di daerah, khususnya di lokus penelitian Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan koordinasi pembangunan di daerah, khususnya di lokus penelitian.

Penulis memilih informan yang terlibat langsung dengan penerapan SIPD. dengan menggunakan teknik

purposive sampling. Sumber data yang diperoleh dari informan dapat berupa pendapat lisan yang dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah para pejabat dan pelaksana pada direktorat perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Pada tingkat daerah, sesuai dengan lokus penelitian ini responden adalah Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang dan Sub Bidang pada Bappeda Kota Bengkulu yang terlibat dalam pengelolaan SIPD. Selanjutnya yang menjadi narasumber adalah para pelaksana atau administrator yang menangani SIPD pada masing-masing SKPD yang ada di kota Bengkulu.

Pengumpulan data dilakukan di Bappeda Kota Bengkulu. Selain itu pengumpulan data juga akan dilakukan pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Teknik utama dalam pengumpulan data menggunakan wawancara secara semi-structured interview. Instrumen pendukung lain yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi. Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik yang mendukung hasil wawancara.

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar, dengan langkah-langkah kompilasi seluruh data, mereduksi data, menyajikan data, memvalidasi data dan akhirnya melakukan penarikan kesimpulan (Creswell, 2009).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari George C. Edward III sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Terdapat empat dimensi yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan konsistensi.

1). Komunikasi

Komunikasi pelaksanaan SIPD sudah dilakukan oleh Bappeda Kota Bengkulu kepada instansi-instansi pemerintah di Kota Bengkulu. Penyebaran informasi dilakukan dalam bentuk penyaluran informasi berupa sosialisasi. Pada rapat sosialisasi ini adalah tahap pertama untuk memperkenalkan SIPD kepada Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu. Hal ini bertujuan agar instansi Pemerintah di Kota Bengkulu dapat mengetahui adanya kegiatan pelaksanaan SIPD. Akan tetapi, dari 31 OPD dan Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu yang diundang tersebut hanya terdapat 18 OPD dan Instansi Pemerintah di

Kota Bengkulu yang hadir atau sekitar 58% saja.

Kejelasan pelaksanaan SIPD sudah terdapat dalam peraturan-peraturan pemerintah. Dimana data-data SIPD bersumber dari setiap Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan SIPD tersebut. SIPD merupakan sistem yang menyediakan data-data urusan konkuren, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan dari semua Instansi Pemerintah di daerah.

Konsistensi merupakan kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilakukan oleh pelaksana SIPD, dalam kaitannya dengan SIPD setiap instansi Pemerintah Kota Bengkulu memiliki satu staf yang bertugas menjadi Tim pengelola SIPD yang memiliki tugas mengumpulkan, mengisi, memvalidasi data instansi Pemerintah yang bersangkutan. Dimana Bappeda yang menyiapkan format isian data untuk diberikan kepada OPD dan Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu untuk diisi dan dikembalikan ke Bappeda. Konsistensi komunikasi pelaksanaan SIPD cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui kejelasan tupoksi pelaksana SIPD sehingga para pelaksana dapat menjalankan tugasnya sesuai arahan. Setiap tiga bulan diadakan rapat evaluasi pengumpulan data dengan mengundang OPD dan Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu yang tergabung dalam SK Walikota Bengkulu.

2). Sumber Daya

Pelaksanaan SIPD diperlukannya kerjasama Bappeda dan instansi lainnya. Untuk itu dibentuklah tim pengelolaan data SIPD. Terdapat 4 koordinator yang bertugas mengelola SIPD Kota Bengkulu. Tiap-tiap koordinator bekerjasama dalam menyebarkan format isian data kepada 18 OPD dan Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu. Tim pengelola SIPD yang tergabung dalam SK Walikota berjumlah 18 OPD, yang dianggap memiliki ketersediaan data yang lebih baik dibandingkan dengan Instansi pemerintah lainnya.

Sumberdaya staf merupakan unsur penting pelaksana dalam implementasi kebijakan, agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, maka sumberdaya staf harus memiliki keseimbangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kompilasi informasi mengenai pelaksanaan SIPD sudah dilaksanakan oleh Bappeda melalui pembagian format isian data yang dibuat oleh operator SIPD di Bappeda Kota Bengkulu untuk seluruh Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu. Format isian

data yang dibuat berdasarkan ketersediaan data maupun jumlah instansi pemerintah di Kota Bengkulu, sehingga operator SIPD di OPD maupun instansi pemerintah di Kota Bengkulu dapat mengisi format isian data yang telah diberikan. Setelah operator SIPD di OPD Kota Bengkulu mengisi format isian data selanjutnya operator SIPD di Bappeda Kota mengambil format isian data tersebut untuk diinputkan ke dalam aplikasi SIPD.

Wewenang pelaksanaan SIPD mengenai bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan SIPD telah diatur dalam Undang-Undang serta Permendagri yang mengatur tentang SIPD dan lebih diperkuat lagi dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan hasil observasi, pembagian penyebaran tanggung jawab dalam mengimplementasikan SIPD di Kota Bengkulu sudah cukup baik. Melalui pembagian kerja antar organisasi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi pemerintah di Kota Bengkulu. Pada pelaksanaan SIPD, Bappeda Kota Bengkulu memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana yang ada berupa 1 unit komputer, 1 unit printer, 8 unit meja, dan 8 unit kursi.

3). Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Susunan kepegawaian pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016 pada lampirannya terdapat nama-nama, susunan dan uraian tugas tim pengelola SIPD di Kota Bengkulu.

Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingannya sendiri, maka dengan memanipulasi insentif dari para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Insentif merupakan salah satu bentuk reward, yaitu menambah keuntungan atau biaya tertentu sehingga mendorong para pelaksana kebijakan dapat mengimplementasikan SIPD di Kota Bengkulu dengan baik. Berdasarkan Laporan Akhir SIPD pada pelaksanaan kegiatan Penyusunan Data Program SIPD berdasarkan DPA Bappeda tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 89.600.000, - (Delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu

rupiah). Dana tersebut untuk operasional dan insentif. Berdasarkan anggaran kegiatan tersebut, insentif yang diberikan kepada OPD dan Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu masih sangat kecil.

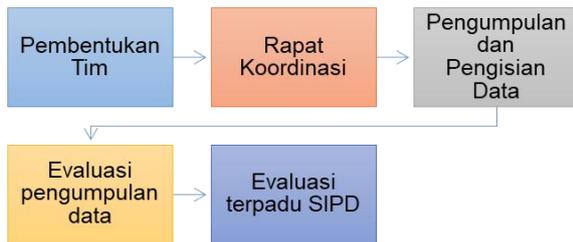
4). Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pelaksana dalam implementasi SIPD di Kota Bengkulu sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Keputusan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

Bappeda dalam melaksanakan SIPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas yang memuat tata cara awal pelaksanaan SIPD dari pengumpulan data sampai dengan rapat evaluasi data.

Kenyataannya di lapangan apabila dicermati kelemahan pelaksanaan SIPD adalah belum banyak melibatkan struktur birokrasi yang menangani proses penganggaran.

Alur utama pelaksanaan SIPD dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 2. Alur Utama Pelaksanaan SIPD
Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2017

Permendagri di dalamnya juga membahas tim pengelola SIPD kabupaten/kota dan kebutuhan data-data yang diperlukan dalam aplikasi SIPD. Sehingga dalam pelaksanaan SIPD dibutuhkan komitmen dari kepala daerah agar penyelenggaraan SIPD dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Namun dari observasi hasil penelitian yang dilakukan, dengan fakta belum adanya sanksi terkait pelanggaran Standar Operasional Prosedur SIPD menunjukkan belum optimalnya komitmen kepala daerah dalam implementasi SIPD.

B. Koordinasi Pembangunan

Koordinasi Pembangunan merupakan variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini, dengan melakukan pendekatan melalui 3 (tiga) bentuk koordinasi yaitu koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi fungsional. Koordinasi memiliki dua indikator yaitu sinkronisasi dan

harmonisasi, dimana antara sinkronisasi dan harmonisasi saling berkaitan.

1). Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal yang dianalisa dalam penelitian adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi terhadap lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah yaitu antar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di daerah. Dari aspek koordinasi vertikal pelaksanaan SIPD berkaitan dengan penyelarasan kerjasama secara harmonisasi dan sinkronisasi antar Ditjen Bina Bangda, Bappeda Provinsi Bengkulu dan Bappeda Kota Bengkulu.

SIPD sebagai alat untuk mengkoordinasikan data dan informasi pembangunan yang ada di daerah. Data dan informasi pembangunan daerah tersebut dihubungkan dengan teknologi informasi. Selain itu pemerintah pusat melaksanakan pembimbingan teknis kepada pemerintah daerah melalui Bappeda di masing-masing daerah.

Hal ini diharapkan memudahkan koordinasi pembangunan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika dilihat dari hubungan vertikal ini pelaksanaan SIPD di Kota Bengkulu berjalan dengan baik, setiap akhir tahun Bappeda Kota Bengkulu membuat laporan akhir tahunan SIPD yang dilaporkan kepada Bappeda Provinsi dan selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat melalui Ditjen Bina Bangda.

2). Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal yang dianalisa dalam hasil penelitian ini dimana penyelarasan kerjasama secara harmonisasi dan sinkronisasi antar lembaga-lembaga yang sederajat yaitu antara Bappeda dengan OPD maupun instansi pemerintah lainnya di Kota Bengkulu.

Pelaksanaan koordinasi SIPD secara horizontal berkaitan dengan penyelarasan kerjasama yang membutuhkan data dan informasi. Koordinasi antara setiap OPD maupun instansi pemerintah di Kota Bengkulu yang terlibat dalam pelaksanaan SIPD dengan Bappeda sudah berjalan cukup sesuai dengan harapan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan akhir tahunan SIPD yang menunjukkan bahwa setiap OPD instansi pemerintah yang terlibat di Kota Bengkulu telah memanfaatkan SIPD dengan cukup baik dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan daerah. Namun kelemahan utama dari koordinasi horizontal adalah hanya melihat

dari aspek perencanaan, belum sampai pada aspek penganggaran atau keuangan. Hal ini berdampak belum terintegrasinya antara perencanaan dengan penganggaran.

3). Koordinasi Fungsional

Koordinasi fungsional yaitu penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan, dalam hal ini antara pejabat fungsional umum pengelola SIPD Dirjen Bina Bangda dengan pejabat fungsional umum pengelola SIPD di daerah. Dalam pelaksanaannya secara teknis membutuhkan koordinasi antara operator SIPD di daerah dan operator SIPD di Pusat.

Praktiknya koordinasi menggunakan media sosial (WhatsApp) untuk komunikasi intensif antara operator SIPD dari tingkat pusat, tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyelesaian kendala yang dihadapi oleh operator SIPD di daerah. Sehingga setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan cepat.

Koordinasi yang dilakukan secara fungsional antara Tim Pengelola SIPD pusat dengan Tim pengelola SIPD di daerah dinilai sudah cukup baik. Dilihat dari komunikasi yang dilakukan melalui media komunikasi sosial (WhatsApp), para pelaksana SIPD di pusat maupun di daerah dapat saling menanyakan apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan SIPD.

C. Kendala Dalam Penerapan SIPD

Pada pelaksanaan SIPD dibutuhkan koordinasi pembangunan yang baik antar pelaksana SIPD, akan tetapi koordinasi pembangunan yang dilakukan masih mengalami kendala atau hambatan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya SKPD maupun Instansi vertikal di Kota Bengkulu yang belum mengetahui pelaksanaan SIPD dikarenakan tidak mengikuti rapat sosialisasi SIPD dari awal, atau menugaskan orang yang berbeda dalam setiap rapat.

Bappeda telah melakukan upaya pengumpulan data yang valid, dengan menyebarkan format isian data SIPD, namun kendala yang terjadi seringkali format tersebut tidak kembali atau seandainya kembali tidak lengkap dalam pengisiannya. Hal ini mencerminkan bahwa belum adanya komitmen dan kesadaran dari perangkat daerah akan pentingnya validitas data dan informasi.

Kendala lain dalam penerapan SIPD adalah belum adanya sanksi yang jelas bagi SKPD dan pelaksana yang terlibat apabila tidak memenuhi ketercapaian keterisian data atau bahkan tidak mengisi data SIPD sama sekali. Sementara Bappeda selaku koordinator tidak dapat bertindak tegas karena keterbatasan wewenang yang dimilikinya.

Hambatan lain dalam pelaksanaan SIPD adalah kurangnya fasilitas dan sarana dalam pelaksanaan SIPD berupa komputer yang berfungsi sebagai media utama dalam *inputting* data, sertai faktor lain yang menyertai adalah rendahnya *band witch* internet. Infrastruktur jaringan yang ada belum memadai dan tidak stabil, padahal efektifitas sebuah sistem informasi manajemen sangat dominan ditentukan oleh kualitas jaringannya.

D. Upaya Bappeda Kota Bengkulu mengatasi kendala penerapan SIPD dalam meningkatkan koordinasi pembangunan di daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu sebagai koordinator pelaksanaan SIPD telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi SIPD. Bappeda berupaya menambah operator SIPD dari OPD dan Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu dari 14 OPD menjadi 18 OPD Kota Bengkulu.

Bappeda kota Bengkulu juga melakukan monitoring mengenai format isian data secara berkala terhadap OPD dan Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu. Penyebaran format isian data yang dibagikan ke OPD dan Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu dilakukan per tiga bulan sekali. Sehingga SIPD dapat digunakan sebagai data yang akurat untuk perumusan perencanaan pembangunan. Terkait dengan data ini dilakukan juga evaluasi pengumpulan data setiap bulan Juni dan pada akhir bulan Desember dalam rapat evaluasi terpadu setiap tahun. Bappeda Kota Bengkulu membuat laporan akhir tahun SIPD, melalui laporan akhir tahun ini sangat berguna melihat sejauh mana keterisian data SIPD Kota Bengkulu.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu adalah memberikan saran melalui Walikota kepada Ditjen Bangda Kemendagri dalam rangka perbaikan mekanisme, sistem dan prosedur SIPD antara lain menyangkut penyempurnaan aplikasi SIPD terkait elemen data SIPD yang berbasis urusan terutama untuk urusan konkuren, revisi Permendagri 8 Tahun 2014 tentang SIPD, fasilitasi penguatan kelembagaan SIPD di daerah dan intensifikasi Bimtek bagi tim pelaksana SIPD.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses komunikasi telah dijalankan oleh Bappeda Kota Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari intensitas penyebaran informasi kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Bengkulu. Bappeda juga telah menyusun Surat Keputusan Walikota yang memuat kejelasan pelaksanaan kegiatan. Pada Surat Keputusan yang dimaksud juga terdapat konsistensi tentang uraian tugas yang harus dilakukan.
- 2) Sumber Daya yang ada dalam mendukung implementasi kebijakan SIPD masih belum

- memadai terutama jika dilihat kuantitas dan kualitas staf, jumlah dan kemampuan staf masih belum memadai. Demikian juga apabila dilihat dari dukungan fasilitas yang disediakan untuk mendukung kinerja staf, masih belum memadai.
- 3) Disposisi dalam arti sikap dan perilaku unjuk kerja para pelaksana masih rendah, hal ini dikarenakan minimnya anggaran dan insentif bagi para pelaksana implementasi SIPD yang ada di kota Bengkulu, khususnya bagi para Administrator (Admin) yang ada di SKPD-SKPD Kota Bengkulu.
 - 4) Struktur Organisasi pelaksana SIPD cukup jelas yaitu dalam bentuk Tim Koordinasi Penerapan SIPD, tetapi karena kurangnya komitmen pimpinan akan pentingnya Implementasi SIPD dan kurangnya kerjasama antar pelaksana yang ada di SKPD-SKPD, berakibat koordinasi dalam perencanaan pembangunan belum begitu baik.

Penulis memberikan saran untuk meningkatkan koordinasi pembangunan dalam implementasi SIPD, sebagai berikut:

- 1) Perlu diupayakan terselenggaranya bimbingan teknis kepada OPD dan Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu guna mendukung pemenuhan data-data pembangunan Kota Bengkulu.
- 2) Diperlukan komitmen Kepala Daerah akan pentingnya pelaksanaan SIPD sebagai basis data perencanaan pembangunan sehingga dapat memaksimalkan keterisian data SIPD.
- 3) Diperlukan dana yang memadai untuk operasional maupun insentif bagi Pengelola SIPD.
- 4) Perlu diberikan sanksi administrasi untuk para pelaksana SIPD apabila kinerja pengelolaan tidak sesuai dan tingkat keterisian data rendah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penelitian, khususnya kepada Direktur perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah beserta seluruh pejabat pelaksana program SIPD. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Bengkulu beserta pejabat dan pelaksana program SIPD, dan tak lupa ditujukan kepada seluruh administrator pengelola program SIPD pada setiap perangkat daerah yang ada di Kota Bengkulu.

VI. DAFTAR REFERENSI

- Creswell, J.W. (2009). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kumorotomo, W. dan Margono, S.A. (2009). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Laudon, Kenneth C & Laudon, Jane P. (2005). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm Eight Edition*. Boston: Prentice Hall.
- Singh, Y.K. (2006). *Fundamental of Research Methodology and Statistics*. New Delhi: New Age Internastional (P) Ltd.
- Syafii, I.K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Tachjan, (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Wahab, S.A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi, KeImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2009). *Analisa Kebijakan Publik*, Jakarta: Banyumedia Publishing.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Bappeda, Profil Daerah Kota Bengkulu, 2017
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah